



Pancasila Sebagai Etika Keutamaan: Tinjauan Kritis Atas Tantangan Moral Globalisasi Digital di Indonesia

Pancasila as Virtue Ethics: A Critical Review of Moral Challenges in Indonesia's Digital Globalization

Putri Nadia Utami^{1*}, Indah Nomi Varya Ningsih², Najua Sifa³, Indry Okuli Sitio⁴, Sarmika Perangin-angin⁵, M. Tata Alfarizi⁶

Universitas Negeri Medan

Email : nadiau928@gmail.com, indahnomyvaryaningsih@gmail.com, najuasifa01@gmail.com, ndryokuli@gmail.com, Sarmikaparanginangin@gmail.com, alfarizimtata@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-10-2026

Revised : 12-10-2026

Accepted : 14-10-2026

Published : 16-10-2026

Abstract

Globalization and advances in digital technology have transformed the way people interact, communicate, and make moral decisions. These changes bring benefits, but they also give rise to problems such as misinformation, intolerance, online harassment, privacy violations, digital polarization, and ethical dilemmas in artificial intelligence. In Indonesia, Pancasila serves not only as the state foundation but also as a value system that guides ethical conduct in social, national, and state life. This study aims to examine Pancasila as an ethical system through deontological, teleological, and virtue ethics perspectives; to identify moral challenges arising from digital globalization; to examine internal and external obstacles in strengthening Pancasila ethics; and to formulate Pancasila's conceptual position in addressing contemporary moral problems. This research employs a qualitative approach using a critical/narrative literature review. The sources include philosophy and ethics books, scientific journal articles, and relevant institutional documents. Content and thematic analysis were applied to organize the literature. The results show that Pancasila cannot be reduced to a single ethical theory. Its values encompass moral obligation, consideration of consequences, and character formation. Kaelan and Notonagoro emphasize Pancasila as an interconnected value system, while Magnis-Suseno's Javanese ethics enriches the virtue dimension through wisdom and social harmony. In facing digital globalization, Pancasila can serve as a normative framework for evaluating technological progress while upholding humanity, unity, deliberation, and social justice. Nevertheless, its effectiveness depends on the ability to translate abstract values into concrete moral issues and to strengthen digital literacy.

Keywords : Ethical system, Globalization, Pancasila

Abstrak

Globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah mengubah pola interaksi, komunikasi, dan pengambilan keputusan moral manusia. Perubahan tersebut membawa manfaat, tetapi juga memunculkan persoalan seperti informasi keliru, sikap tidak toleran, perundungan daring, pelanggaran privasi, polarisasi digital, dan dilema etika kecerdasan buatan. Di Indonesia, Pancasila berperan bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai sistem nilai yang menuntun perilaku etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian ini bertujuan menelaah Pancasila sebagai sistem etika melalui sudut pandang deontologis, teleologis, dan etika keutamaan; mengidentifikasi tantangan moral akibat globalisasi digital; menelaah hambatan internal dan eksternal dalam memperkuat etika Pancasila; serta merumuskan kedudukan konseptual Pancasila dalam menjawab persoalan moral masa kini. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur kritis/naratif. Sumber yang digunakan meliputi buku filsafat dan etika, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen kelembagaan yang relevan. Analisis isi dan tematik diterapkan



untuk mengelompokkan literatur. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Pancasila tidak dapat dipersempit menjadi satu teori etika tertentu. Nilainya mencakup kewajiban moral, pertimbangan akibat, dan pembentukan karakter. Kaelan dan Notonagoro menegaskan Pancasila sebagai sistem nilai yang saling terhubung, sedangkan etika Jawa Magnis-Suseno memperkaya dimensi keutamaan melalui kebijaksanaan dan harmoni sosial. Dalam menghadapi globalisasi digital, Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai kemajuan teknologi sambil menjunjung kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Meski demikian, efektivitasnya bergantung pada kemampuan menerjemahkan nilai abstrak ke dalam persoalan moral konkret serta memperkuat literasi digital.

Kata Kunci: Globalisasi, Pancasila, Sistem etika

PENDAHULUAN

Globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertukar informasi, dan mengambil keputusan moral. Giddens (1999) menyebut globalisasi sebagai proses yang mempersempit hubungan sosial lintas wilayah, sementara Bauman (2000) melukiskan kondisi modern sebagai *liquid modernity*, yakni keadaan sosial yang berubah cepat dan tidak stabil. Perubahan ini membuka peluang besar, tetapi sekaligus memunculkan persoalan moral seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perundungan daring, pelanggaran privasi, polarisasi digital, dan dilema etika kecerdasan buatan (AI).

Di Indonesia, Pancasila berperan bukan sekadar sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai sistem nilai yang memberi arah moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaelan (2010) menempatkan Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik, sedangkan Notonagoro menguraikan keterkaitan antarsila sebagai satu kesatuan hierarkis-piramidal dan organis. Pemikiran Magnis-Suseno (1984) mengenai etika Jawa turut relevan untuk memperkaya dimensi kebijaksanaan, karakter, dan harmoni sosial dalam etika Pancasila.

Kajian tentang Pancasila dan etika digital mulai berkembang, misalnya penelitian Yusuf et al. (2024) tentang Pancasila sebagai sumber etika digital, Irawan (2024) tentang etika AI berbasis Pancasila, serta Harjanto dan Najicha (2024) tentang Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika penggunaan AI. Namun, pembahasan Pancasila sebagai sistem etika masih perlu diperdalam melalui tipologi teori etika, yaitu deontologis, teleologis, dan etika keutamaan. Kajian ini bertujuan menelaah Pancasila sebagai sistem etika, mengidentifikasi tantangan moral globalisasi digital, menelaah hambatan penguatan etika Pancasila, serta merumuskan kedudukan konseptual Pancasila dalam menghadapi persoalan moral kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode *critical/narrative literature review*. Metode tersebut dipilih karena kajian bersifat filosofis-konseptual dan tidak bermaksud mengukur perilaku masyarakat secara statistik. Sumber penelitian meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan Pancasila, teori etika, globalisasi, etika digital, dan kecerdasan artifisial.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Garuda. Kata kunci yang dipakai mencakup “Pancasila sebagai sistem etika”, “Pancasila dan etika digital”, “Pancasila dan globalisasi”, “Pancasila artificial intelligence”, “digital ethics”, “AI ethics”, “virtue ethics”, dan “global ethics”. Literatur klasik seperti Kaelan (2010), Magnis-Suseno (1984),



Notonagoro, Kant, Aristoteles, MacIntyre, Giddens, dan Bauman dimanfaatkan untuk membangun fondasi konseptual. Literatur kontemporer digunakan untuk menghubungkan kerangka tersebut dengan isu etika digital dan AI.

Analisis dilakukan melalui analisis isi dan tematik. Literatur dikelompokkan berdasarkan tema: (1) teori etika; (2) Pancasila sebagai sistem etika; (3) globalisasi dan etika global; (4) disrupsi digital; (5) kendala internal dan eksternal; serta (6) posisi Pancasila dalam merespons persoalan moral kontemporer. Analisis tidak dilakukan dengan merangkum sumber satu per satu, melainkan melalui sintesis antarsumber untuk menemukan hubungan konseptual dan perbedaan argumentasi. Penelitian ini merupakan studi literatur sehingga hasilnya berada pada tingkat konseptual dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Pancasila dalam Tipologi Teori Etika

Hasil analisis literatur memperlihatkan bahwa Pancasila tidak dapat direduksi menjadi satu teori etika saja. Ketiga pendekatan etika—deontologis, teleologis, dan etika keutamaan—lebih tepat dipakai sebagai alat analisis untuk memahami dimensi etis Pancasila.

Dimensi deontologis tampak dari adanya prinsip moral yang membatasi tindakan manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia, misalnya, menjadi alasan untuk menolak tindakan yang merendahkan orang lain meskipun tindakan itu menguntungkan pelaku. Dalam konteks digital, prinsip ini relevan untuk isu privasi, perundungan daring, dan penyebaran informasi yang merugikan.

Dimensi teleologis terlihat pada perhatian Pancasila terhadap kehidupan bersama. Nilai persatuan dan keadilan sosial menegaskan bahwa tindakan atau kebijakan tidak cukup dinilai dari manfaat individu, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Dalam perkembangan teknologi, pendekatan ini dipakai untuk menilai apakah inovasi memberi manfaat luas atau justru menimbulkan ketimpangan, termasuk dalam penggunaan AI.

Dimensi etika keutamaan menunjukkan pentingnya pembentukan karakter yang selaras dengan nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan tidak cukup dipahami sebagai aturan, tetapi harus menjadi kebiasaan dan sifat. Dengan posisi multidimensional ini, Pancasila dapat menjawab berbagai masalah moral: pertanyaan “boleh atau tidak” dianalisis secara deontologis, dampak tindakan secara teleologis, dan karakter pengguna teknologi melalui etika keutamaan.

Kesatuan Antarsila sebagai Dasar Sistem Etika

Pemikiran Kaelan dan Notonagoro menunjukkan bahwa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan. Keterkaitan antarsila membuat suatu nilai tidak dapat dipisahkan dari nilai lain. Kaelan (2010) menekankan Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem nilai, sedangkan Notonagoro menguraikan struktur hierarkis-piramidal dan organis antarsila. Sila pertama mencakup dan memberi makna pada sila-sila berikutnya, sementara sila-sila lain menjelaskan keseluruhan sistem.

Implikasi etisnya, nilai ketuhanan tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan; kemanusiaan tidak dapat berdiri tanpa persatuan; persatuan berkaitan dengan musyawarah; dan seluruh proses



tersebut bertujuan mencapai keadilan sosial. Dalam konteks AI, efisiensi teknologi tidak dapat menjadi satu-satunya acuan. Kerangka Pancasila menuntut agar teknologi dipertimbangkan bersama aspek kemanusiaan, persatuan, pengambilan keputusan deliberatif, dan keadilan sosial.

Etika Kebijaksanaan dan Keterkaitannya dengan Pancasila

Magnis-Suseno (1984) dalam *Etika Jawa*, khususnya Bab VIII “Etika Jawa dan Relativisme”, menguraikan etika Jawa sebagai etika kebijaksanaan. Etika ini menekankan kemampuan manusia bertindak tepat dalam konteks kehidupan bersama, bukan semata kepatuhan pada aturan universal. Pandangan ini memperkaya pemahaman Pancasila sebagai etika keutamaan, terutama pada nilai persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah yang menuntut individu mampu mengendalikan kepentingan pribadi, menghormati orang lain, dan memperhatikan kepentingan bersama.

Namun, perlu ditegaskan bahwa etika Jawa merupakan sistem moral dalam konteks budaya Jawa, sedangkan Pancasila adalah sistem nilai nasional Indonesia. Pemikiran Magnis-Suseno tidak secara langsung menyamakan Pancasila dengan etika keutamaan, tetapi dipakai sebagai kerangka analitis untuk memahami kebijaksanaan, karakter, dan harmoni sosial.

Globalisasi dan Perubahan Orientasi Moral

Globalisasi menghubungkan masyarakat dengan berbagai sistem nilai. Persoalan moral tidak hanya menjadi pertentangan antara nilai lokal dan global, tetapi juga proses negosiasi dan penyesuaian nilai. Konsep *liquid modernity* Bauman (2000) membantu menjelaskan keadaan sosial yang cepat berubah, sementara Giddens (1999) menunjukkan bahwa batas lokal dan global semakin kabur.

Bagi Indonesia, kondisi ini menuntut adanya orientasi nilai yang berfungsi sebagai dasar seleksi. Pancasila dapat dipakai untuk menilai nilai yang datang, bukan dengan menolak semua pengaruh global, tetapi dengan menguji kesesuaiannya terhadap prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Konsep *Global Ethic* Küng dan Kuschel (1993) dapat menjadi pembanding karena berupaya menemukan nilai bersama antartradisi agama dan budaya. Pancasila tidak bertentangan dengan etika global, tetapi berdialog dengannya dari konteks sejarah dan sosial Indonesia.

Disrupsi Digital sebagai Tantangan Moral

Dunia digital mengubah cara manusia berhubungan. Penyebaran informasi yang cepat membuat tindakan individu dapat berdampak sosial lebih besar. Menyebarakan informasi salah bukan hanya masalah ketepatan informasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan sosial dan memperparah konflik. Yusuf et al. (2024) menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar etika dalam pendidikan kewarganegaraan digital.

Dari sudut etika keutamaan, tantangan digital tidak hanya memerlukan aturan, tetapi juga karakter pengguna yang mampu mengontrol diri, mempertimbangkan dampak tindakan, dan menghormati orang lain. Literasi digital tidak cukup berarti kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan menilai informasi dan memahami dampak tindakan.



Kecerdasan Buatan dan Masalah Etika Baru

AI memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab atas keputusan yang diambil atau dibantu sistem otomatis. Masalah lain adalah keadilan: sistem AI dapat memberikan hasil berbeda bagi kelompok berbeda jika data dan proses pembuatannya mengandung bias. Irawan (2024) menekankan pentingnya keadilan sosial, keberagaman, dan akuntabilitas moral dalam pengembangan AI di Indonesia. Yuwono et al. (2026) mengembangkan kerangka etika AI berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan prinsip tanggung jawab transendental, keadilan manusiawi, kohesi sosial, tata kelola deliberatif, dan keadilan distributif.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat memberi petunjuk normatif terhadap AI. Namun, nilai-nilai Pancasila masih perlu diterjemahkan ke dalam prinsip nyata seperti keterbukaan, tanggung jawab, perlindungan manusia, dan pembagian manfaat teknologi.

Tantangan Internal dan Eksternal

Tantangan internal utama adalah jarak antara mengetahui nilai dan menjalani nilai. Seseorang dapat memahami bahwa suatu perilaku tidak sejalan dengan Pancasila, tetapi pengetahuan itu tidak selalu berujung pada tindakan tepat. Karena itu, pendekatan etika berbasis karakter menjadi penting. Jika etika hanya dianggap sebagai aturan, seseorang dapat memahami aturan tanpa memiliki sifat yang mendukung penerapannya.

Tantangan eksternal muncul dari lingkungan sosial yang semakin terbuka dan kompleks. Masyarakat menghadapi beragam nilai, informasi, dan cara hidup dari media, teknologi, ekonomi, serta interaksi global. Jika semua nilai diterima tanpa penilaian, Pancasila berisiko menjadi lambang tanpa fungsi moral. Sebaliknya, menolak semua nilai eksternal juga tidak praktis. Pendekatan yang tepat adalah dialog kritis: menjaga prinsip dasar Pancasila sambil menilai perkembangan global berdasarkan kebutuhan konkret masyarakat.

Pancasila sebagai Kerangka Tanggapan terhadap Degradasi Moral

Pancasila dapat dipakai untuk merespons isu moral kontemporer dengan menerapkan nilai setiap sila pada situasi konkret. Sila pertama memberi arahan tentang tanggung jawab moral dan penghormatan kepada aspek ketuhanan. Sila kedua menjadi landasan penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk penolakan terhadap perundungan, penghinaan, diskriminasi, dan penyalahgunaan teknologi. Sila ketiga memberi panduan persatuan untuk mengatasi polarisasi, ujaran kebencian, dan informasi yang memperburuk konflik sosial. Sila keempat menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, termasuk pentingnya partisipasi dan pertimbangan manusia dalam keputusan sosial. Sila kelima menekankan keadilan sosial, terutama dalam masalah ketidaksetaraan akses teknologi, distribusi manfaat, dan diskriminasi algoritma.

Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai kerangka evaluasi terhadap perkembangan global dan teknologi. Fungsi ini tidak berarti Pancasila memberi solusi teknis untuk semua masalah, tetapi memberikan prinsip untuk menentukan arah moral suatu tindakan.

Sintesis : Pancasila sebagai Etika yang Kontekstual

Kekuatan Pancasila sebagai sistem etika bukan karena kemampuannya memberi aturan teknis untuk setiap masalah, melainkan karena kemampuannya memberi pedoman nilai yang dapat disesuaikan dengan konteks. Kaelan dan Notonagoro menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila saling



terkait dan membentuk satu kesatuan. Magnis-Suseno memperkaya dimensi kebijaksanaan dan kehidupan bersama. Teori deontologi, teleologi, dan keutamaan menawarkan tiga cara pandang untuk mengevaluasi tindakan moral.

Dalam menghadapi globalisasi, Pancasila tidak perlu dipandang sebagai kumpulan nilai tertutup. Pancasila dapat berinteraksi dengan nilai global sekaligus menjaga prinsip utama. Dalam menghadapi teknologi digital dan AI, Pancasila tidak cukup disebut sebagai dasar moral; nilai-nilainya perlu diterjemahkan ke dalam prinsip yang relevan untuk masalah nyata.

KESIMPULAN

Pancasila dapat dipahami sebagai sistem etika yang memiliki dimensi deontologis, teleologis, dan etika keutamaan. Nilai-nilainya tidak hanya menjadi pedoman tindakan benar, tetapi juga mengarahkan manusia untuk mempertimbangkan dampak tindakan dan membentuk karakter sesuai nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Globalisasi dan teknologi digital menghadirkan tantangan moral seperti informasi salah, perundungan daring, polarisasi, dan persoalan etika AI. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pancasila dapat menjadi kerangka etis untuk menyaring perkembangan global dan mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap menghormati manusia dan kepentingan bersama.

Penerapan Pancasila masih menghadapi kendala internal berupa kesenjangan antara pemahaman nilai dan penerapannya, serta kendala eksternal berupa derasnya perubahan global dan teknologi. Karena itu, diperlukan penguatan pendidikan karakter, literasi digital, dan kemampuan menerapkan nilai Pancasila pada persoalan konkret. Secara keseluruhan, Pancasila tetap relevan sebagai sistem etika dalam menghadapi globalisasi karena dapat menjadi dasar untuk menilai dan mengarahkan perubahan dengan tetap berorientasi pada kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Giddens, A. (1999). *Runaway world: How globalisation is reshaping our lives*. Profile Books.
- Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Irawan, I. (2024). Penerapan etika Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab di Indonesia. *bit-Tech*, 7(2), 263–271. <https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1740>
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kant, I. (1997). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785).
- Küng, H., & Kuschel, K.-J. (Eds.). (1993). *A global ethic: The declaration of the Parliament of the World's Religions*. SCM Press.
- MacIntyre, A. C. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. PT Gramedia.



Notonagoro. (1980). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tudjuh.

Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono. (2024). Digital citizenship education: Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(1), 70–83.
<https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721>

Yuwono, A. T., Sebastian, A., Clumpers, P.-J., & Basara, M. (2026). Ethics of using artificial intelligence reviewed from Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*, 3(1), 1–18.
<https://doi.org/10.52738/bti.v3i1.55>